

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairmanita, D. (2023). Penyempurnaan Proses Rekonsiliasi Melalui SAKTI: Penerapan Metode Bussiness Process Improvement pada Akuntansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia. *Jurnal Disprotek*, 99-105.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021, Desember 29). *Peran Penting Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. Diambil kembali dari Laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2965-peran-penting-rekonsiliasi-dalam-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022, Juni 15). *Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker*. Diambil kembali dari Laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/layanan/panduan-satker/rekonsiliasi-laporan-keuangan-tingkat-satker.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023, Februari 06). *Pentingnya Rekonsiliasi Monsakti bagi Laporan Keuangan yang Berkualitas*. Diambil kembali dari Laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/artikel/2990-pentingnya-rekonsiliasi-monsakti-bagi-laporan-keuangan-yang-berkualitas.html>

Djuanda, M. A. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan III 2022 Pada Penerapan Single Database Berbasis Aplikasi SAKTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Djuanda, M. A., & Hamdani, R. (2023). Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi Single Database Sakti. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 52-60.

Khuluq, A., Gata, W., Putra, J. L., & Novitasari, H. B. (2022). Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Single Database SAKTI Menggunakan Finite State Automata. *Jurnal Sains Komputer & Informatika*, 232-241.

KPPN Banda Aceh. (2022, September 16). *Rekonsiliasi UAKPA*. Diambil kembali dari Laman KPPN Banda Aceh: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/layanan-non-spm/rekonsiliasi-uakpa.html>

KPPN Samarinda. (t.thn.). *Sejarah KPPN Samarinda*. Diambil kembali dari Laman KPPN Samarinda: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/samarinda/id/profil/sejarah.html>

KPPN Samarinda. (t.thn.). *Tugas dan Fungsi KPPN Samarinda*. Diambil kembali dari Laman KPPN Samarinda: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/samarinda/id/profil/tugasdanfungsi.html>

KPPN Samarinda. (t.thn.). *Visi dan Misi KPPN Samarinda*. Diambil kembali dari

Laman

KPPN

Samarinda:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/samarinda/id/profil/visi-misi.html>

Marpaung, A. S. (2020). *Analisis Pemanfaatan Aplikasi "Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Monsakti)" dengan Metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Mulyadi, S., & Putri, A. V. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-18/PB/PB.6/2023 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi dan Pemrosesan Data BMN Periode Januari s.d Mei tahun 2023.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-22/PB/PB.106/2023 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2023.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).